

TESIS

**STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH PANTAI SEBAGAI
OBYEK PARIWISATA DI KABUPATEN MAMUJU
(STUDI KASUS PANTAI TAPANDULLU KAB.MAMUJU)**

*Disusun dan diajukan
Sebagai salah satu syarat
untuk mendapatkan gelar Magister*

NURUL IDIL FITRI

P022191007



**MAGISTER PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH
OTONOMI DAERAH
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2021

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

**STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH PANTAI SEBAGAI OBYEK
PARIWISATA DI KABUPATEN MAMUJU
(STUDI KASUS PANTAI TAPANDULLU KAB.MAMUJU)**

disusun dan diajukan oleh

NURUL IDIL FITRI

P022192007

Telah dipertahankan di hadapan panitia ujian yang dibentuk dalam rangka penyelesaian program studi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin

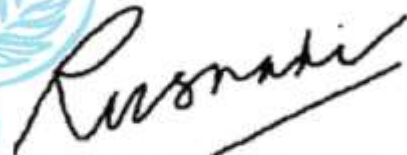
pada tanggal 28 Mei 2021

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. A. Pangerang Moenta, SH, MH, DFM
NIP.19610821987031003

Dr. Ir. Rushadi Padjung, MSc
NIP.196002221985031002

Ketua Program Studi,
Perencanaan dan Pengembangan Wilayah

Dekan Sekolah Pascasarjana
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Ir. Ahmad Munir, M.Eng
NIP.19620727 198903 1 003



Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc
NIP.19670308 199003 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : NURUL IDIL FITRI
NIK : P022191007
Program Studi : PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 2 Juni 2021

Yang menyatakan



10000
METERAI
TEMPEL
BERAFASX172496004
NURUL IDIL FITRI

PRAKATA

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: **“Strategi Pengembangan Wilayah Pantai Sebagai Obyek Pariwisata Di Kabupaten Mamuju (Studi Kasus Pantai Tapandullu Kab. Mamuju)**. Penyusunan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Perencanaan Pengembangan Wilayah pada Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Makassar. Dalam penyusunan tesis ini, berbagai rintangan dan hambatan peneliti alami sejak penyusunan proposal tesis hingga rampungnya tesis ini. Namun berkat doa dan bantuan dari berbagai pihak, maka penyusunan tesis ini dapat terselesaikan walaupun masih perlu diperlukan banyak masukan untuk kesempurnaan tesis ini.

Tesis ini dapat terselesaikan dengan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu peneliti sangat berterima kasih khususnya ditujukan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. A. Pangerang Moenta, SH. MH, DFM selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Ir. Rusnadi Padjung, Msc selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan waktunya memberikan bimbingan, arahan dan saran yang telah diberikan kepada peneliti.
2. Seluruh dosen pengajar beserta seluruh staf pendukung studi Magister Perencanaan Pengembangan Wilayah Program Pascasarjana

Universitas Hasanuddin yang telah mencurahkan tambahan ilmu pengetahuan yang berguna bagi peneliti.

3. Kepala Dinas dan Seluruh Staff Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab.Mamuju yang telah menerima dan memberikan izin untuk mengambil data-data yang diperlukan sehubungan dengan penelitian ini.
4. Segenap keluarga besar, Ibunda serta saudara-saudaraku yang telah memberikan dukungannya baik berupa materil maupun spiritual sehingga peneliti dapat merampungkan tesis ini.
5. Teruntuk suami dan anak-anakku tercinta yang telah rela mengorbankan waktunya yang selama ini mendukung dan memotivasi peneliti untuk lebih giat lagi dalam menyelesaikan studi.
6. Rekan-rekan mahasiswa yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungannya.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih banyak kekurangan, oleh karenanya kritik dan saran sangat penulis harapkan guna menyempurnakan penulisan ini. Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih dan semoga tesis ini dapat berguna bagi kita semua.

Makassar, 3 Juni 2021

Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	
LEMBAR PENGESAHAN	i
PRAKATA	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
ABSTRAK.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Daya Tarik Pariwisata Kab. Mamuju.....	14
B. Tinjauan Tentang Pengembangan Wilayah	20
C. Tinjauan Tentang Wilayah Pesisir	31
D. Tinjauan Tentang Obyek Pariwisata	35
E. Tinjauan Tentang Konsep Strategi	43
F. Sintesa Penelitian	51
G. Kerangka Pikir	53
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian	56
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	56
C. Populasi dan Sampel.....	57
D. Teknik Pengumpulan Data.....	58
E. Teknik Analisis Data	64
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Lokasi Penelitian	66

B. Hasil	71
C. Pembahasan	112
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	148
B. Saran	149
Daftar Pustaka	

DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Hal
1	Data tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju pada tahun 2016, 2017 dan 2018	5
2	Sintesa Penelitian	51
3	Matriks SWOT	59
4	Data Pengamatan Yang Akan di Gunakan Dalam Penelitian	61
5	Data tentang Daya Tarik Wisata yang dipromosikan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju	76
6	Identifikasi Aspek Pariwisata	97
7	Analisis faktor Internal dan Eksternal wisata Pantai Tapandullu	99
8	Analisis Matriks Antara <i>Strengths</i> (S) Dengan <i>Opportunities</i> (O)	105
9	Analisis Matriks Antara <i>Weakness</i> (W) Dengan <i>Opportunities</i> (O)	106
10	Analisis Matriks Antara <i>Strengths</i> (S) Dengan <i>Threats</i> (T)	108
11	Analisis Matriks Antara <i>Weakness</i> (S) Dengan <i>Threats</i> (T)	109
12	Skala Prioritas Utama Pengembangan Pantai Tapandullu	110
13	Daya Tarik Pantai Tapandullu	113

ABSTRAK

Nurul Idil Fitri. Strategi Pengembangan Wilayah Pantai Sebagai Obyek Pariwisata Di Kabupaten Mamuju. (dibimbing oleh **Pangerang Moenta** dan **Rusnadi Padjung**)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Pengembangan Wilayah Pantai Sebagai Obyek Pariwisata Di Kabupaten Mamuju. Pariwisata merupakan suatu bidang yang potensial dalam pembangunan suatu daerah, karena pariwisata dianggap membawa dampak positif sebagai motor penggerak kegiatan ekonomi rakyat.

Penelitian ini merupakan studi kasus di Pantai Tapandullu kabupaten Mamuju. Jenis penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif menggunakan metode Eksploratif. Dalam pemilihan informan penelitian dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*) sebanyak 7 informan. Data analisis dengan model interaktif terdiri atas tiga tahapan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dalam megembangkan wilayah pantai sebagai daerah tujuan wisata di wilayah Kabupaten Mamuju dengan Meningkatkan promosi wisata daerah di Kabupaten Mamuju, Mengembangkan wisata produktif berbasis lingkungan, Menumbuhkan peran aktif masyarkat untuk ikut serta dalam membangun sector pariwisata, dan Meningkatkan peran Pemerintah daerah, Swasta dan Masyarakat dalam pengembangan Pariwisata di Kabupaten Mamuju. Faktor yang berpengaruh dalam pengembangan pariwisata yaitu Faktor pendukung dalam pengelolaan objek wisata yaitu potensi daerah dan peran aktif dari masyarkat sehingga dapat mengembangkan dan membangun objek wisata Pantai Tapandullu yang lebih baik dan dapat menarik perhatian wisatawan. Sedangkan faktor penghambat dalam Tata Kelola Pariwisata Pantai Tapandullu yaitu sarana dan prasarana yang belum memadai dan keterbatasan anggaran sehingga menghambat dalam proses pengembangan objek wisata Pantai Tapandullu. Strategi menajerial pengembangan wisata pantai diwujudkan dalam bentuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen pasar wisata untuk mengoptimalkan pengembangan destinasi Pariwisata pantai. Diharapkan bagi pemerintah kabupaten Mamuju membuat strategi untuk pengembangan kemitraan pemasaran terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan dalam pembangunan wilayah Pantai menjadi objek pariwisata.

Kata Kunci : Pariwisata, Pantai, SWOT, Pemerintah Derah

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan pariwisata merupakan suatu proses untuk pengembangan wilayah dengan memberikan kontribusi dalam meningkatkan pendapatan suatu daerah maupun masyarakat. Pengembangan pariwisata penting juga dalam mendorong kegiatan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memberikan peluang kerja. Peran tersebut, antara lain ditunjukkan oleh kontribusi kepariwisataan dalam menyumbang penerimaan devisa dengan negara, nilai tambah PDRB, dampak yang diberikan dikunjungi wisatawan sehingga memberikan kemakmuran dan kesejahteraan serta pembangunan manusia bagi penduduk setempat dimana pariwisata itu dikembangkan (Yoeti, 2008).

Dewasa ini, pariwisata dianggap membawa dampak positif sebagai motor penggerak kegiatan ekonomi rakyat. Daerah dengan potensi pariwisata dapat menghidupkan kegiatan ekonomi masyarakat sekitar dengan timbulnya usaha-usaha skala kecil sampai menengah, mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan kembali digunakan oleh pemerintah untuk melaksanakan pembangunan di daerah dan mencapai kesejahteraan (Riyaningtyas, 2014).

Oleh karena itu, daerah pesisir pantai menjadi daerah yang strategis untuk dikelola dalam rangka memenuhi hajat hidup masyarakat, terutama berkaitan dengan pembangunan ekonomi yang dapat menunjang perekonomian masyarakat sekitar, pemerintah daerah maupun pihak-pihak lainnya. Pengelolaan daerah pesisir tentu saja melibatkan banyak pemangku kepentingan (*stakeholders*), sehingga berbagai kepentingan pun bertemu atas nama pembangunan daerah pesisir (Adam, 2018).

Pemanfaatan sumberdaya laut dalam bentuk kegiatan pariwisata dapat mengambil manfaat dan fungsi dari nilai-nilai keindahan yang terdapat pada lingkungan laut. Keindahan alam laut dapat diperoleh melalui kegiatan wisata pantai, panorama pantai, selancar, *game fishing*, dan selam. Pariwisata laut atau bahari juga meliputi kegiatan berjemur dan berenang di tepi pantai, serta fotografi bawah laut atau taman laut. Kegiatan wisata tidak hanya dinikmati oleh wisatawan dari mancanegara tetapi juga oleh masyarakat sekitar objek wisata bahari. Kegiatan wisata memberikan pengalaman menyenangkan bagi pengunjung sehingga berpengaruh terhadap kesegaran pikiran para pengunjung setelah sekian waktu penat dengan rutinitas pekerjaan masing-masing. Hal menarik lainnya yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat terhadap laut adalah olahraga air. Berbagai jenis olahraga air yang sekaligus menjadi bagian dari kegiatan wisata bahari seperti *water scooter*, *seabob*, *sausage boat*, *banana boat*, *water tricycle*, *wind surfing*, *surfboarding*, *paddle board*, *parasailing*, *kayaking*.

Selain peran yang dimiliki, pariwisata juga merupakan suatu sektor yang tidak jauh berbeda dengan sektor ekonomi yang lain yakni dalam proses perkembangannya juga mempunyai dampak dibidang sosial dan ekonomi. Pengaruh yang ditimbulkan tersebut dapat berupa pengaruh positif maupun negatif terhadap kehidupan masyarakat setempat. Untuk mencegah perubahan itu menuju ke arah negatif maka diperlukan suatu perencanaan yang mencakup aspek sosial dan ekonomi, sehingga sedapat mungkin masyarakat setempat ikut terlibat di dalam perencanaan dan pengembangan pariwisata. Hal ini perlu dilakukan untuk mendukung keberhasilan pengembangan daerah wisata yang bersangkutan. Proses pembangunan dan pengembangan suatu wilayah dapat ditunjang oleh potensi wisata yang dimilikinya (Heryati, 2019).

Pengembangan pariwisata ini juga tidak terlepas dari perubahan-perubahan terhadap pendapatan masyarakat, mulai dari masyarakat yang hanya memiliki penghasilan di bawah rata –rata, kini masyarakat bisa memperbaiki perekonomian sedikit demi sedikit, masyarakat yang berada disekitar wilayah pantai Tapandullu yang hanya memiliki satu sektor pencarian kini mulai berinovasi mengembangkan potensi wisata budaya dari masyarakat itu sendiri, dengan potensi pariwisata budaya yang menjanjikan tersebut masyarakat juga semakin melakukan inovasi – inovasi terhadap lokasi pariwisata tersebut dengan tujuan menambah ketertarikan wisatawan untuk berkunjung dengan keuntungan berubahnya perekonomian masyarakat diwilayah tersebut.

Perlu sejenak diketahui dalam wilayah Kabupaten Mamuju yang merupakan salah satu dari Enam Kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Barat, yang akan menjadi prioritas pembangunannya adalah pengembangan obyek pariwisata utamanya pengembangan daerah pesisir.

Potensi kawasan pesisir di Kabupaten Mamuju sangatlah besar seperti pemanfaatan pesisir sebagai objek wisata pantai, pengembangan perikanan, budidaya rumput laut hal ini dapat dimanfaatkan dengan merumuskan strategi pengembangan wilayah peisir yang baik.

Salah satu sumber potensial Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sektor pariwisata. Pengembangan sektor pariwisata daerah Kabupaten Mamuju didukung Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan yang menyebutkan keberadaan obyek wisata pada suatu daerah akan sangat menguntungkan, antara lain meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melestarikan alam dan lingkungan, memperkuat jati diri bangsa dan memupuk rasa cinta tanah air.

Kemudian Sebagaimana yang tertulis dalam Peraturan daerah Kabupaten Mamuju Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tahun 2016-2021 dijelaskan bahwa, salah satu tujuan dan sasaran misi Kabupaten Mamuju adalah menjadikan Kabupaten Mamuju sebagai daerah pengembangan pariwisata dan budaya.

Di Kabupaten Mamuju itu sendiri, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju dari sektor pariwisata masih belum maksimal. Pada sektor pariwisata hanya mampu menyumbang sekitar 50% dari target yang telah direncanakan mulai dari tahun 2016 sampai 2018.

Tabel 1 Data tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju pada tahun 2016, 2017 dan 2018

No	Tahun	Target	Realisasi	%
1	2016	Rp.150.000.000	Rp.80.125.000	53,42
2	2017	Rp.150.000.000	Rp.81.200.000	54,13
3	2018	Rp.150.000.000	Rp.81.820.000	54,84

Sumber : (Dinas Pendapatan daerah Kab. Mamuju, 2019)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan gambaran umum keuangan daerah yang mencakup unsur pajak daerah dan retribusi daerah. Namun sampai saat ini upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengembangan pariwisata yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju masih mengalami berbagai macam kendala seperti, fasilitas Daya Tarik Wisata yang kurang baik, belum dilakukannya pemanfaatan informasi Daya Tarik Wisata berbasis internet, belum adanya Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA), peran masyarakat kurang aktif dalam membantu pengembangan pariwisata dan masalah-masalah lainnya. Semenjak dibentuknya Provinsi Sulawesi Barat pada bulan Oktober Tahun 2004. Salah satu strategi yang telah diprogramkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju dalam menuju Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

adalah Pembangunan Kota Mamuju sebagai Ibu Kota Provinsi dengan konsep Kota Wisata.

Wilayah pesisir beserta sumberdaya alamnya memiliki makna strategis bagi pengembangan ekonomi di Kabupaten Mamuju, karena dapat diandalkan sebagai salah satu pilar ekonomi daerah, keuntungan dari pengembangan wilayah pesisir salah satunya adalah meningkatkan taraf perekonomian masyarakat pesisir sehingga perlu adanya pengembangan wilayah pesisir yang berkelanjutan.

Kawasan Obyek Wisata Pantai Tapandullu di Kabupaten Mamuju memiliki luas \pm 2 ha, sekarang terdapat perumahan disekitar pantai. Namun daya tarik wisata ini dikelola oleh swasta dengan ketentuan serta pengawasan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju.

Obyek Wisata Pantai Tapandullu memiliki fasilitas antara lain tersedianya perahu untuk mengelilingi pantai, persewaan ban untuk berenang, dapat juga untuk memancing atau sekedar bersantai sambil menikmati keindahan pantai dan deburan ombak. Fasilitas tambahan seperti petugas keamanan, sarana tempat ibadah, tempat kegiatan olahraga seperti olahraga volley, tempat sampah, lahan parkir yang luas, penjual makanan, dan toilet.

Selain keanekaragam terumbu karangnya, pemandangan bawah laut Obyek Wisata Pantai Tapandullu juga diramaikan oleh kehadiran berberapa jenis ikan laut seperti ikan badut dan ikan kakak tua berdahi bulat atau juga dikenal dengan sebutan ikan *bumphead*.

Potensi lain yang ada pada pengembangan obyek wisata Pantai Tapandullu di Kabupaten Mamuju adalah adanya daya tarik wisata pantai yang potensial untuk dikembangkan, termasuk pula daya tarik wisata pantai yang banyak diminati masyarakat, Lokasi tidak jauh dari pusat kota dan bernilai komersial yang dapat menunjang nilai investasi, serta memiliki ruang terbuka (*open space*) dan kawasan pantai yang sangat luas.

Dalam pengembangan potensi obyek wisata Pantai Tapandullu di Kabupaten Mamuju banyak faktor yang mempengaruhi sukses atau tidak pengembangannya, dimana mempunyai banyak potensi pariwisatanya yang meliputi wisata alam.

Berdasarkan hal tersebut, perlu ditetapkan strategi serta kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk mendorong pembangunan dan pengembangan kegiatan pariwisata. Kebijakan-kebijakan tersebut harus mengakomodir prinsip-prinsip pariwisata berkelanjutan, Meliputi penciptaan lapangan kerja, konservasi sumber daya alam, pemeliharaan dan peningkatan kualitas hidup serta kesejahteraan local (Peace, 2014).

Kendala yang dihadapi masyarakat hingga saat ini mencakup beberapa hal antara lain yaitu secara internal, masyarakat dihadapkan pada kurangnya pengetahuan tentang cara pengelolaan usaha pariwisata yang baik karena sebagian masyarakat daerah Pantai Tapandullu berpendidikan rendah dan kurangnya pengetahuan manajemen kewirausahaan. Sedangkan kendala eksternal meliputi kurangnya modal masyarakat dalam mengembangkan usaha yang telah mereka miliki,

kesulitan mencari teman bisnis dalam bermitra pada daerah Pantai Tapandullu serta kurangnya dukungan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dengan kurangnya melakukan penyuluhan tentang pariwisata.

Untuk kemajuan obyek wisata di Kabupaten Mamuju khususnya Obyek Wisata Pantai Tapandullu, sangat diharapkan sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar pantai. Kemajuan pariwisata harus mampu memberikan kemajuan perekonomian masyarakat sekitar obyek wisata. Hal inilah yang harus dipecahkan oleh semua kalangan, baik pemerintah maupun *stakeholders* yang berperan penting dalam dunia pariwisata.

Harapan lain dari masyarakat bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang ada di Kabupaten Mamuju sekarang hendaknya memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Kemajuan pariwisata harus diimbangi dengan kemajuan perekonomian masyarakat.

Strategi pengembangan pesisir pantai di Kabupaten Mamuju sebagai kawasan objek pariwisata belum dilaksanakan dengan baik, dimana belum adanya suatu konsep yang ideal mengakibatkan banyak permasalahan yang timbul, padahal kawasan pesisir pantai sangat memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan.

Kabupaten Mamuju memiliki banyak tempat menarik untuk dijadikan objek wisata. Karena potensi objek wisata kurang diperhatikan dan dikembangkan sehingga potensi itu tidak terlihat sampai ke daerah lain

sehingga wisatawan yang mengunjungi Kabupaten Mamuju hanya wisatawan domestik. Selama tahun 2016 jumlah wisatawan domestic sebanyak 24.314 dan wisatawan mancanegara sebanyak 24.300, pada tahun 2017 jumlah wisatawan domestic sebanyak 16.400 dan wisatawan mancanegara sebanyak 16.339. pada tahun 2018 jumlah wisatawan domestic sebanyak 15.100 dan wisatawan mancanegara sebanyak 70 , terlihat jika pengunjung wisatawan di Kabupaten cenderung mengalami penurunan.

Pengembangan pesisir pantai di Kabupaten Mamuju belum dapat memberikan Pendapatan Asli Daerah yang optimal, meningkatkan taraf hidup masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun hal tersebut belum dapat tercapai karena strategi pengembangan yang belum optimal. Dari uraian ini tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pengembangan wilayah pesisir yang dapat diterapkan sebagai sumbangsi ke Pemerintah Daerah bersama masyarakat dalam mengembangkan pesisir pantai di Kabupaten Mamuju sebagai kawasan obyek pariwisata yang menarik.

Dalam pengembangan kegiatan pariwisata diperlukan pengaturan-pengaturan serta strategi alokasi ruang yang dapat menjamin *sustainable development* guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dalam penataan ruang yang bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya buatan secara berdaya guna, berhasil guna, dan tepat guna untuk meningkatkan

kualitas sumber daya manusia, mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan, dan mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan keamanan (Syahril, 2015; Suwanto, 2004).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas bahwa mengingat begitu kompleks permasalahan wilayah pesisir, sifat, karakteristik, dan dinamika wilayah pesisir maka keberadaan Undang-Undang No.1 tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sangat strategis untuk mewujudkan keberlanjutan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir. undang-undang ini mencakup pemberian hak kepada masyarakat untuk mengusulkan penyusunan Rencana Strategis, Rencana Zonasi, Rencana Pengelolaan, serta Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah menganalisis :

1. Bagaimana kebijakan strategi wilayah pesisir sebagai daerah tujuan wisata Pantai Tapandullu di Kabupaten Mamuju ?
2. Faktor apa saja yang berpengaruh dalam pengembangan pariwisata Pantai Tapandullu di Kabupaten Mamuju ?
3. Bagaimana strategi manajerial pengembangan wilayah pesisir sebagai obyek pariwisata Pantai Tapandullu di Kabupaten Mamuju ?

C. Tujuan Penelitian

a) Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi pengembangan wilayah pantai Tapandullu sebagai obyek pariwisata di Kabupaten Mamuju

b) Tujuan Khusus

- a) Mengidentifikasi Faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengembangan pariwisata Pantai Tapandullu di Kabupaten Mamuju
- b) Mengidentifikasi Strategi formulasi pengembangan wilayah pesisir sebagai obyek pariwisata Pantai Tapandullu di Kabupaten Mamuju
- c) Mengemukakan strategi implementasi pengembangan wilayah pesisir sebagai obyek pariwisata Pantai Tapandullu di Kabupaten Mamuju
- d) Mengemukakan strategi manajerial pengembangan wilayah pesisir sebagai obyek pariwisata Pantai Tapandullu di Kabupaten Mamuju

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat menambah sumbangsih dalam rangka memperkaya dan memperluas ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang kajian strategi pengembangan wilayah

pesisir sebagai obyek pariwisata di Kabupaten Mamuju melalui pengujian teori yang dilakukan.

2. Manfaat Praktis

Hal ini merupakan salah satu bentuk tri darma perguruan tinggi yakni penelitian yang menjadi pengalaman berharga bagi peneliti dalam melatih diri menggunakan cara berpikir secara objektif, ilmiah, kritis, analitik untuk mengkaji teori dan realita yang ada di lapangan.

3. Manfaat Bagi Peneliti

Menambah pengalaman yang sangat berharga dalam rangka memperoleh wawasan dan pengetahuan, selain itu juga merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Magister.

4. Manfaat Institusi

Sebagai bahan pertimbangan dan pembelajaran bagi pemerintah daerah Kabupaten Mamuju secara khusus dinas pariwisata kabupaten mamuju sehingga dapat memperbaiki sistem perencanaan dalam mengembangkan wilayah pesisir pantai sebagai obyek pariwisata.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Daya Tarik Pariwisata Kabupaten Mamuju

Daya tarik wisata pada awal perkembangan pariwisata di Indonesia adalah untuk mengistilahkan objek wisata, namun setelah undang-undang Nomor 10 pada tahun 2009 di terbitkan, kata objek wisata selanjutnya tidak digunakan lagi untuk menyebut kata objek wisata yang merupakan daerah tujuan para wisatawan.

Untuk memahami pengertian dan makna dari kata daya tarik wisata tersebut, berikut dijabarkan pengertian daya tarik wisata dari beberapa sumber sebagai berikut :

- 1) Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009, daya tarik wisata dijelaskan sebagai segala sesuatu yang mempunyai keunikan, keindahan dan nilai yang berwujud keanekaragaman, kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau kunjungan para wisatawan.
- 2) Menurut Yoeti (2006 : 164), menyatakan bahwa daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi daya tarik bagi wisatawan untuk mengunjungi suatu daerah tertentu.
- 3) Menurut Nyoman S. Pendit (2003 : 35), mengatakan bahwa daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menarik dan mempunyai nilai untuk dikunjungi dan dilihat.

Dari beberapa pengertian yang dijelaskan di atas tentang daya tarik wisata, maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan daya tarik wisata adalah segala sesuatu disuatu tempat yang memiliki keunikan, keindahan, kemudahan dan nilai yang berwujud keanekaragaman kekayaan alam maupun buatan manusia yang menarik dan mempunyai nilai untuk dikunjungi dan dilihat oleh wisatawan.

Pada dasarnya, daya tarik wisata dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yakni daya tarik wisata alamiah dan daya tarik wisata buatan. Daya tarik wisata alamiah adalah daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yg terdiri dari keadaan alam, flora dan fauna. Sedangkan daya tarik wisata buatan merupakan hasil karya manusia yang terdiri dari museum, peninggalan sejarah, seni dan budaya, wisata agro, wisata buru, wisata petualangan alam, taman rekreasi dan kompleks hiburan. Menurut Nyoman S. Pendit (2003), menyatakan bahwa terdapat daya tarik wisata lainnya yakni minat khusus yang merupakan suatu hal yang menjadi daya tarik wisata sesuai dengan minat dari wisatawannya seperti berburu, mendaki gunung, menyusuri gua, industry dan kerajinan, tempat perbelanjaan, sungai air deras, tempat-tempat ibadah, tempat ziarah dan lain sebagainya.

Lebih lanjut tentang faktor-faktor yang dapat menjadi daya tarik wisata, terdapat 10 faktor yang menjadi faktor penarik suatu daerah menjadi daya tarik wisata, yaitu (1) iklim suatu daerah, (2) gencarnya usaha promosi, (3) produk barang maupun jasa pada suatu daerah, (4)

even-even khusus, (5) insentif potongan harga dan sejenis, (6) ajakan teman, (7) mengunjungi kerabat dan teman, (8) daya tarik wisata, (9) budaya dan (10) lingkungan alamiah maupun buatan manusia.

Suatu daya tarik wisata pada prinsipnya harus memenuhi tiga persyaratan, yakni:

- a) Objek wisata tersebut harus memiliki apa yang disebut dengan "Something to see" (ada yang dilihat), maksudnya harus mempunyai daya tarik khusus, disamping itu juga harus memiliki atraksi wisata yang dapat menghibur bila orang berkunjung ke sana.
- b) Selanjutnya harus mempunyai "Something to do" (ada yang dikerjakan), selain banyak yang dapat dilihat, suatu objek atau daya tarik wisata harus memiliki fasilitas yang dapat digunakan agar pengunjung betah tinggal lebih lama.
- c) Kemudian harus ada "Something to buy" (ada yang dapat dibeli atau souvenir) terutama barang-barang souvenir dan kerajinan tangan yang dibuat rakyat setempat sebagai oleh-oleh atau cenderamata untuk dibawa pulang ke tempat masing-masing

1. Daya tarik wisata Kabupaten Mamuju

Kabupaten Mamuju memiliki luas wilayah sebesar 5.064,19 km² yang secara administratif terbagi ke dalam 11 kecamatan. Kecamatan yang paling luas wilayahnya adalah Kecamatan Kalumpang dengan luas 1.731,99 km² atau 34,20 persen dari luas wilayah Kabupaten Mamuju

Sementara kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Balabalakang dengan luas 21,86 km² atau 0,43 persen. Kecamatan yang letaknya paling jauh dari ibukota Kabupaten Mamuju adalah Kecamatan Balabalakang yaitu 202 km.

Mamuju sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Barat memiliki sejumlah objek wisata yang layak untuk dikunjungi. Topografi wilayahnya yang berupa daerah pesisir pantai dan pegunungan membuat Mamuju memiliki keindahan alam tersendiri.

Wilayahnya yang terletak di tepi barat Pulau Sulawesi dan berbatasan langsung dengan Selat Makassar membuat Mamuju memiliki beberapa objek wisata pantai. Sementara di sisi timur, wilayahnya berupa daerah pegunungan yang berbatasan dengan Gunung Adang Batambalo membuat Mamuju juga memiliki objek wisata pegunungan.

Mamuju juga termasuk kota heterogen, dengan warganya dari beragam suku dan pemeluk agama berbeda yang hidup rukun dan damai. Di antaranya suku Mamuju, Mandar, Bugis, Mamasa, Toraja, Jawa, Bali, Tionghoa, dan suku-suku lainnya dengan agama yang beragam, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha.

Kabupaten Mamuju memiliki ketersediaan fasilitas penunjang pariwisata yang mendukung berjalannya berwisata bagi wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Mamuju seperti tersedianya rumah makan, perbankan, bandara, terminal, pelabuhan, travel agent. Adapun jumlah penginapan di kabupaten Mamuju sebanyak 42 penginapan dan terdapat

5 hotel. Walaupun sampai saat ini belum terdapat kerjasama dengan pemerintah daerah namun fasilitas ini tetap berkontribusi dalam menunjang aktivitas pariwisata di Kabupaten Mamuju

Adapun beberapa tempat wisata yang menjadi destinasi bagi para wisatawan adalah :

1. Kelapa Tujuh
2. Air Terjun Tammasapi
3. Bukit Jati Gentungan
4. Puncak Mamuju City
5. Wisata Pantai Mangrove Ampallas
6. Wisata Pantai Galung
7. Pantai Tapandullu Selatan
8. Air Terjun Kalando
9. Anjoro Pitu
10. Wisata Panorama Mamuju
11. Masjid Al – Madaniah
12. Kampung Nelayan
13. Air Mancur Bundaran Arteri Mamuju
14. Masjid Raya Suada
15. Masjid Jami Nurul Muttahidah
16. Masjid Kantor Gubernur
17. Pantai Ujung Bulu
18. Pantai Palippis

19. Air Terjun Malute

20. Pantai Manakarra

21. Pulau Karampuang

Upaya peningkatan promosi wisata yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju masih belum maksimal di setiap Daya Tarik Wisata yang ada di Kabupaten Mamuju, hal ini dapat dijelaskan dengan membandingkan antara jumlah keseluruhan Daya Tarik Wisata yang ada di Kabupaten Mamuju dengan Daya Tarik Wisata yang dipromosikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju

Menurut data tentang Daya Tarik Wisata Kabupaten Mamuju yang telah terdaftar di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju yaitu berjumlah 45 Daya Tarik Wisata, sedangkan Daya Tarik Wisata yang dipromosikan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Mamuju pada tahun 2015 hanya sebanyak 4 daya Tarik Wisata, pada tahun 2016 Daya Tarik Wisata yang dipromosikan sebanyak 3 Daya Tarik Wisata dan pada tahun 2017 Daya Tarik yang dipromosikan berjumlah 4 Daya Tarik Wisata saja.

Selain merencanakan mempromosikan Daya Tarik Wisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga mengadakan event dan festival tiap tahunnya untuk menarik wisatawan agar berkunjung ke tempat-tempat Daya Tarik Wisata yang ada di Kabupaten Mamuju.

B. Tinjauan Tentang Pengembangan Wilayah

1. Pengertian Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah adalah suatu strategi untuk memanfaatkan serta mengkombinasikan faktor internal yaitu kekuatan dan kelemahan, faktor eksternal yaitu peluang dan tantangan yang ada sebagai bentuk potensi dan peluang sehingga dapat dimanfaatkan untuk dapat meningkatkan produktifitas wilayah yang berkaitan dengan barang dan jasa yang juga merupakan fungsi dari kebutuhan baik secara internal maupun eksternal disuatu wilayah tertentu. Faktor internal ini berupa sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya teknologi, sedangkan faktor eksternal dapat berupa peluang dan ancaman yang akan muncul seiring dengan perkembangan wilayah lain (Syahril, 2015).

Wilayah dapat diartikan sebagai unit geofrafis dengan batas-batas spesifik tertentu dalam artian komponen-komponen wilayah antara satu sama lain yang memiliki interaksi secara fungsional. Berdasarkan undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur yang berkaitan dimanan ada batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrative dan atau aspek fungsional. Sehingga dapat dikatakan batasan wilayah tidak selalu bersifat fisik tetapi dapat bersifat dinamis. Komponen-komponen wilayah dapat mencakup komponen biofisik alam, sumberdaya buatan dalam hal ini infrastruktur, sumber daya manusia serta bentuk-bentuk kelembagaan, sehingga dengan demikian

istilah wilayah menekankan interaksi antar manusia dengan sumberdaya lainnya yang ada dalam suatu batasan unit dalam geografis tertentu. (Adrianus & Labuda, 2018)

Adapun konsep wilayah yang paling klasik menurut Hagget dkk, 1997 bahwa tipologi wilayah mengklasifikasikan konsep wilayah ke dalam tiga kategori, yaitu: (1) wilayah homogen (*uniform/homogenous region*); (2) wilayah nodal (*nodal region*); dan (3) wilayah perencanaan (*planning region atau programming region*). Sejalan dengan klasifikasi tersebut, berdasarkan fase kemajuan perekonomian mengklasifikasikan region/wilayah menjadi: 1) fase pertama yaitu wilayah formal yang berkenaan dengan keseragaman/*homogenitas*. Wilayah formal adalah suatu wilayah geografik yang seragam menurut kriteria tertentu, seperti keadaan fisik geografi, ekonomi, sosial dan politik. 2) fase kedua yaitu wilayah fungsional yang berkenaan dengan koherensi dan interdependensi fungsional, saling hubungan antar bagian-bagian dalam wilayah tersebut. Kadang juga disebut wilayah nodal atau *polarized region* dan terdiri dari satuan-satuan yang heterogen, seperti desa-kota yang secara fungsional saling berkaitan. 3) fase ketiga yaitu wilayah perencanaan yang memperlihatkan koherensi atau kesatuan keputusan-keputusan ekonomi (Heryati, 2019).

wilayah adalah satu kesatuan unit geografis yang antar bagiannya mempunyai keterkaitan secara fungsional. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan pewilayahan (penyusunan wilayah) adalah pendelineasian unit

geografis berdasarkan kedekatan, kemiripan, atau intensitas hubungan fungsional (tolong menolong, bantu membantu, lindung melindungi) antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya.

Wilayah Pengembangan adalah pewayalahan untuk tujuan pengembangan/pembangunan/*development*. Tujuan-tujuan pembangunan terkait dengan lima kata kunci, yaitu: (1) pertumbuhan; (2) penguatan keterkaitan; (3) keberimbangan; (4) kemandirian; dan (5) keberlanjutan. Sedangkan konsep wilayah perencanaan adalah wilayah yang dibatasi berdasarkan kenyataan sifat-sifat tertentu pada wilayah tersebut yang bisa bersifat alamiah maupun non alamiah yang sedemikian rupa sehingga perlu direncanakan dalam kesatuan wilayah perencanaan.

Pembangunan merupakan upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanistik. Sedangkan menurut Anwar (2005), pembangunan wilayah dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan wilayah yang mencakup aspek-aspek pertumbuhan, pemerataan dan keberlanjutan yang berdimensi lokasi dalam ruang dan berkaitan dengan aspek sosial ekonomi wilayah. Pengertian pembangunan dalam sejarah dan strateginya telah mengalami evolusi perubahan, mulai dari strategi pembangunan yang menekankan kepada pertumbuhan ekonomi, kemudian pertumbuhan dan kesempatan kerja, pertumbuhan dan pemerataan, penekanan kepada kebutuhan dasar (*basic need approach*),

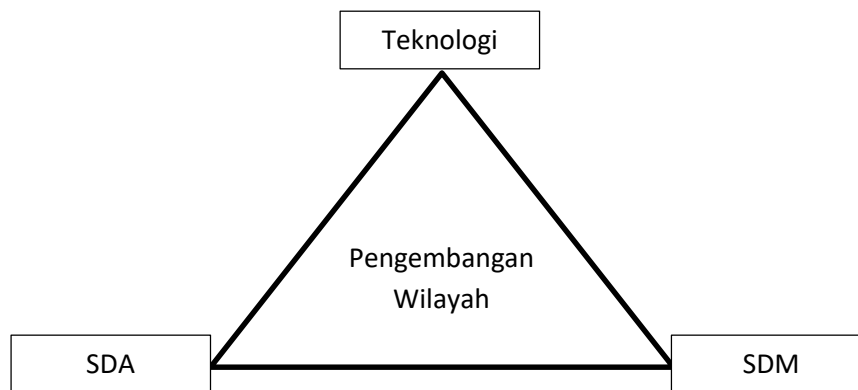
pertumbuhan dan lingkungan hidup, dan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).

Pendekatan yang diterapkan dalam pengembangan wilayah di Indonesia sangat beragam karena dipengaruhi oleh perkembangan teori dan model pengembangan wilayah serta tatanan sosial-ekonomi, sistem pemerintahan dan administrasi pembangunan. Pendekatan yang mengutamakan pertumbuhan tanpa memperhatikan lingkungan, bahkan akan menghambat pertumbuhan itu sendiri. Pengembangan wilayah dengan memperhatikan potensi pertumbuhan akan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui penyebaran penduduk lebih rasional, meningkatkan kesempatan kerja dan produktifitas (Mercado, 2002).

Menurut Alkadri (2001) pengembangan adalah kemampuan yang ditentukan oleh apa yang dapat dilakukan dengan apa yang dimiliki untuk meningkatkan kualitas hidup. Kata pengembangan identik dengan keinginan menuju perbaikan kondisi disertai kemampuan untuk mewujudkannya. Pendapat lain bahwa pengembangan adalah suatu proses untuk mengubah potensi yang terbatas sehingga mempengaruhi timbulnya potensi yang baru, dalam hal ini termasuk mencari peluang yang ada dalam kelompok-kelompok yang berbeda yang tidak semuanya mempunyai potensi yang sama (Budiharsono, 2002).

pengembangan wilayah sebagai program yang menyeluruh dan terpadu dari semua kegiatan dengan memperhitungkan sumber daya

yang ada dan kontribusinya pada pembangunan suatu wilayah. Pendapat lain menyebutkan pengembangan wilayah adalah upaya untuk memacu perkembangan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan antar wilayah dan menjaga kelestarian lingkungan hidup pada suatu wilayah. Pengembangan wilayah sangat diperlukan karena kondisi sosial ekonomi, budaya dan geografis yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Pada dasarnya pengembangan wilayah harus disesuaikan dengan kondisi, potensi dan permasalahan wilayah yang bersangkutan. Pengembangan wilayah sebagai hubungan yang harmonis antara sumber daya alam, manusia, dan teknologi dengan memperhitungkan daya tampung lingkungan dalam memberdayakan masyarakat, seperti terlihat pada gambar berikut :



Gambar 1 : Hubungan Antar elemen Pembangunan

Pada umumnya pengembangan wilayah mengacu pada perubahan produktivitas wilayah, yang diukur dengan peningkatan populasi penduduk, kesempatan kerja, tingkat pendapatan, dan nilai tambah industri pengolahan. Selain definisi ekonomi, pengembangan wilayah

mengacu pada pengembangan sosial, berupa aktivitas kesehatan, pendidikan, kualitas lingkungan, kesejahteraan dan lainnya. Pengembangan wilayah lebih menekankan pada adanya perbaikan wilayah secara bertahap dari kondisi yang kurang berkembang menjadi berkembang, dalam hal ini pengembangan wilayah tidak berkaitan dengan eksploitasi wilayah.

Tujuan pengembangan wilayah mengandung 2 (dua) sisi yang saling berkaitan yaitu sisi sosial dan ekonomis. Dengan kata lain pengembangan wilayah adalah merupakan upaya memberikan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, misalnya menciptakan pusat-pusat produksi, memberikan kemudahan prasarana dan pelayanan logistik dan sebagainya.

Pengembangan wilayah dalam jangka panjang lebih ditekankan pada pengenalan potensi sumber daya alam dan potensi pengembangan lokal wilayah yang mampu mendukung (menghasilkan) pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan sosial masyarakat, termasuk pengentasan kemiskinan, serta upaya mengatasi kendala pembangunan yang ada di daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam rencana pembangunan nasional, pengembangan wilayah lebih ditekankan pada penyusunan paket pengembangan wilayah terpadu dengan mengenali sektor strategis (potensial) yang perlu dikembangkan di suatu wilayah.

Sedangkan pengembangan wilayah sangat dipengaruhi oleh komponen-komponen tertentu seperti :

- 1) *Sumber daya lokal*. Merupakan kekuatan alam yang dimiliki wilayah tersebut seperti lahan pertanian, hutan, bahan galian, tambang dan sebagainya. Sumber daya lokal harus dikembangkan untuk dapat meningkatkan daya saing wilayah tersebut.
- 2) *Pasar*. Merupakan tempat memasarkan produk yang dihasilkan suatu wilayah sehingga wilayah dapat berkembang.
- 3) *Tenaga kerja*. Tenaga kerja berperan dalam pengembangan wilayah sebagai pengolah sumber daya yang ada.
- 4) *Investasi*. Semua kegiatan dalam pengembangan wilayah tidak terlepas dari adanya investasi modal. Investasi akan masuk ke dalam suatu wilayah yang memiliki kondisi kondusif bagi penanaman modal.
- 5) *Kemampuan pemerintah*. Pemerintah merupakan elemen pengarah pengembangan wilayah. Pemerintah yang berkapasitas akan dapat mewujudkan pengembangan wilayah yang efisien karena sifatnya sebagai katalisator pembangunan.
- 6) *Transportasi dan Komunikasi*. Transportasi dan komunikasi berperan sebagai media pendukung yang menghubungkan wilayah satu dengan wilayah lainnya. Interaksi antara wilayah seperti aliran barang, jasa dan informasi akan sangat berpengaruh bagi tumbuh kembangnya suatu wilayah.

7) *Teknologi*. Kemampuan teknologi berpengaruh terhadap pemanfaatan sumber daya wilayah melalui peningkatan output produksi dan keefektifan kinerja sektor-sektor perekonomian wilayah.

Pengembangan wilayah adalah upaya pembangunan dalam suatu wilayah administratif atau kawasan tertentu agar tercapai kesejahteraan (*people property*) melalui pemanfaatan peluang-peluang dan pemanfaatan sumber daya secara optimal, efisien, sinergi dan berkelanjutan dengan cara menggerakkan kegiatan-kegiatan ekonomi, penciptaan iklim kondusif, perlindungan lingkungan dan penyediaan prasarana dan sarana. Pada dasarnya komponen utama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dalam suatu wilayah adalah kemajuan ekonomi wilayah bersangkutan.

2. Pengembangan Wilayah Sistem *Top Down*

Sistem pengembangan wilayah di Indonesia sebelum otonomi daerah dilaksanakan secara *top down*, baik kebijakan perluasan wilayah administratif maupun pembentukan wilayah kawasan ekonomi. Hal yang sama juga dilakukan dalam pembentukan kawasan khusus yang mengutamakan landasan kepentingan nasional yang mencerminkan karakteristik pendekatan regionalisasi sentralistik. Dalam hal ini aspek pengambilan keputusan dilaksanakan secara *top down* (Abdurrahman, 2005).

Terdapat tiga konsep pengembangan kawasan, yakni (1) konsep kutub pertumbuhan (*growth pole*), (2) integrasi (keterpaduan) fungsional-spasial, dan (3) pendekatan *decentralized territorial*. Di Indonesia konsep

growth pole dirintis mulai tahun delapan puluhan yaitu dengan menekankan investasi massif pada industri-industri padat modal di pusat-pusat urban terutama di Jawa di mana banyak tenaga kerja, dengan harapan dapat menciptakan penyebaran pertumbuhan (*spread effect*) atau efek tetesan ke bawah (*trickle down effect*) dan berdampak luas terhadap pembangunan ekonomi wilayah. Indikator ekonomi nasional sangat bagus hingga tahun 1997, namun dampaknya bagi pembangunan daerah lain sangat terbatas. Kenyataannya teori ini gagal menjadi pendorong utama (*prime mover*) pertumbuhan ekonomi wilayah. Sebaliknya kecenderungan yang terjadi adalah penyerapan daerah sekelilingnya dalam hal bahan mentah, modal, tenaga kerja dan bakat-bakat *entrepreneur*. Hal ini menyebabkan kesenjangan antar daerah.

Perencanaan dan aplikasi pembangunan dengan paradigma *top down* (sentralistik) tidak dapat membuat perubahan sehingga mulai dievaluasi dan secara bertahap berubah menjadi sistem *bottom up*, dimulai sejak tahun 1998 dengan diundangkannya kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah pada tahun 1999 yang baru diaplikasikan pada tahun 2001. Perubahan dari paradigma sentralistik pasca otonomi daerah tidak serta merta hilang, namun secara berangsur-angsur mulai beralih pola ke arah *bottom up*. Peluang pembangunan wilayah secara nonstruktural, berdasarkan inisiatif lokal dan dikelola tanpa memiliki keterikatan struktural administratif terhadap hirarki yang di atasnya.

3. Pengembangan Wilayah Sistem *Bottom Up*

Pendekatan teknis kewilayahan melalui pendekatan homogenitas atau sistem fungsional mengalami proses yang lebih kompleks karena pelaksanaannya meliputi aspek kesepakatan atau komitmen para aktor regional dalam memadukan kekuatan.

Konsep integrasi fungsional-spasial seperti yang pernah dicetuskan oleh Rondinelli berupa pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dengan berbagai ukuran dan karakteristik fungsional secara terpadu perlu dikembangkan untuk memfasilitasi dan memberi pelayanan regional secara lebih luas.

Namun dimensi ruang (*spatial*) memiliki arti yang penting dalam konteks pengembangan wilayah, karena ruang dapat menciptakan konflik dan pemicu kemajuan bagi individu dan masyarakat. Secara kuantitas ruang adalah terbatas dan secara kualitas ruang memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda-beda. Maka dari itu intervensi terhadap kekuatan pasar (*planning*) yang berwawasan keruangan memegang peranan yang sangat penting dalam formulasi kebijakan pengembangan wilayah. Sehingga keserasian berbagai kegiatan pembangunan sektor dan wilayah dapat diwujudkan, dengan memanfaatkan ruang dan sumber daya yang ada didalamnya guna mendukung kegiatan kehidupan masyarakat (Riyadi *dalam* Ambardi, 2002).

Sebagai suatu sistem yang kompleks perlu intervensi isolasi dalam proses integrasi kedalam dengan kontrol dan subsidi yang mencegah

proses infiltrasi dari luar (Sugiono, 2002). Namun karena penerapan program agropolitan yang berjalan seiring dengan proses globalisasi maka proteksi wilayah sulit dilakukan.

Jadi ada dua sisi yang saling tarik menarik dan keduanya juga saling bertolak belakang. Di mana satu sisi dibutuhkan kemandirian dalam mengembangkan wilayah sementara disisi lainnya dibutuhkan proteksi atau kekuatan central agar satu dan lain hal dapat dikondisikan untuk mencapai tujuan yang ideal. Sementara itu hal lain yang juga berpengaruh besar adalah adanya kekuatan globalisasi yang tidak memungkinkan bagi pemerintah untuk mengatur segala sesatunya sesuai dengan konsep yang dicanangkan. Ada beberapa perubahan yang terjadi sesuai dengan berjalannya proses pembangunan itu sendiri.

C. Tinjauan Tentang Wilayah Pesisir

1) Definisi Wilayah Pesisir

Untuk dapat mengelola pemanfaatan sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan (*en-vironmental services*) kawasan pesisir secara berkelanjutan (*on asustainable basis*), perlu pemahaman yang mendalam tentang pengertian dan karakteristik utama dari kawasan ini. Definisi wilayah pesisir bisa berbeda-beda, karena belum ditemukan suatu istilah paten untuk mengartikannya. Sesuai dengan UU No.27 tahun 2007, wilayah pesisir telah didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara ekosistem daratan dan laut yang ditentukan oleh 12 mil batas wilayah ke arah perairan dan batas kabupaten/kota ke arah pedalaman. Menurut

Kesepakatan umum di dunia bahwa wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan.

Lebih lanjut pengertian "pesisir" bisa dijabarkan dari dua segi yang berlawanan, yakni:

- a) Dari segi daratan, Pesisir adalah wilayah daratan sampai wilayah laut yang masih dipengaruhi sifat-sifat darat (seperti: angin darat, drainase air tawar dari sungai, sedimentasi).
- b) Dari segi laut, Pesisir adalah wilayah laut sampai wilayah darat yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut (seperti: pasang surut, salinitas, intrusi air laut ke wilayah daratan, angin laut).

Ada beberapa definisi mengenai wilayah pesisir dari berbagai sumber, antara lain:

- 1) Menurut Dahuri (2001) memberikan penjelasan mengenai wilayah pesisir sebagai berikut :

“Sampai sekarang belum ada definisi wilayah pesisir yang baku. Namun demikian, kesepakatan umum di dunia bahwa wilayah pesisir adalah suatu wilayah peralihan antara daratan dan lautan. Apabila ditinjau dari garis pantai (coastal), maka suatu wilayah pesisir memiliki dua macam batas (boundaries), yaitu batas yang sejajar garis pantai (longshore) dan batas yang tegak lurus terhadap garis pantai (cross-shore).

- 2) Menurut Poernomosidhi (2007) memberikan pengertian mengenai wilayah pesisir sebagai berikut :

Wilayah pesisir merupakan interface antara kawasan laut dan darat yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi satu sama lainnya, baik secara biogeofisik maupun sosial ekonomi. Wilayah pesisir mempunyai karakteristik yang khusus sebagai akibat interaksi antara proses-proses yang terjadi di daratan dan di lautan. Ke arah darat, wilayah pesisir meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air asin; sedangkan ke arah laut, wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran.

2) Bagian-bagian laut dan Pembagian Zonasi Wilayah Pesisir dan Kelautan

Lingkungan perairan laut secara singkat dapat kita bagi menjadi 2 (dua) bagian utama, yakni:

a. Bagian air yang dikenal sebagai Pelagik (Pelagic)

Bagian ini dapat dibagi secara horisontal maupun vertikal.

Secara horisontal, pelagik dapat dibagi lagi menjadi :

- I. Bagian neritik (perairan pantai)
- II. Bagian oseanik (perairan laut terbuka)

Batas antara kedua bagian tersebut di laut tidak begitu jelas,

tetapi biasanya ditentukan batas neritik hanya sampai pada kedalaman ± 200 meter, meskipun ada faktor-faktor lain yang ikut menentukan, misalnya faktor salinitas, kandungan lumpur, dan lain-lain. Secara vertikal bagian pelagik dapat dibagi menjadi beberapa zona sebagai berikut :

- a. Zona epipelagik (0 -200 meter)
- b. Zona mesopelagik (200-1.000 meter)
- c. Zona bathipelagik (1.000-2.000 meter)
- d. Zona abisopelagik (lebih 2.000 meter)

Suatu zona/lapisan perairan yang masih dapat menerima sinar matahari disebut sebagai photik zone. Umumnya pada lapisan epipelagik lebih banyak menerima sinar matahari dari pada lapisan-lapisan yang berada di bawahnya. Semakin dalam lapisan perairan, semakin sedikit sinar matahari yang masuk kedalam kolom air laut, sehingga dikenal adanya zona Disphotik dan zona Aphotik. Lapisan photik perlu diketahui, mengingat pada zona tersebut merupakan suatu daerah yang paling efektif untuk proses fotosintesis fitoplankton, rumput laut, dan ganggang laut serta kegiatan-kegiatan lain dari biota laut. Sehingga pada zona tersebut dapat dilihat keragaman komunitas yang lebih kompleks, lebih banyak variasinya serta lebih 'semarak' dan menarik dari pada komunitas biota yang hidup pada lapisan disphotik ataupun aphotik.

Tebal tipisnya zona photik sangat tergantung pada beberapa faktor, antara lain tingkat kecerahan (transparency) dan atau tingkat kekeruhan (turbidity) pada perairan yang bersangkutan. Tingkat kecerahan adalah suatu angka menunjukkan jarak penetrasi cahaya matahari ke dalam kolom air laut yang masih bisa dilihat oleh mata kita yang berada di atas permukaan air laut

b. Bagian dasar laut yang dikenal sebagai Bentik (Benthic)

Secara umum zonasi Bentik adalah sebagai berikut:

- 1) Supra lithoral :Merupakan dasar perairan yang selalu dalam keadaan basah karena adanya hempasan ombak yang datang/pergi.
- 2) Sub lithoral :Merupakan daerah pasang surut sampai kedalaman ± 20 meter.
- 3) Eu-lithoral :Bagian dasar perairan dihitung mulai dari garis surut sampai kedalaman ± 200 meter.
- 4) Archibenthal :Daerah lanjutan lithoral yang melengkung kebawah sehingga dasar laut menjadi lebih dalam lagi.
- 5) Batial :Lanjutan dari archibental sampai kedalaman ± 2.000 meter.
- 6) Abisal :Lanjutan Batial dengan kedalaman dari 2.000 s/d 4.000 meter.
- 7) Hadal :Lanjutan Abisal dengan kedalaman lebih dari 4.000 meter.

D. Tinjauan Tentang Obyek Pariwisata

1. Pengertian tentang obyek wisata

Pada hakikatnya berpariwisata adalah suatu proses kepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain di luar tempat tinggalnya. Dorongan kepergiannya adalah karena berbagai kepentingan, baik karena kepentingan ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, agama, kesehatan maupun kepentingan lain seperti karena sekedar ingin tahu, menambah pengalaman ataupun untuk belajar. Istilah pariwisata berhubungan erat dengan perjalanan wisata, yaitu sebagai suatu perubahan tempat tinggal sementara seseorang di luar tempat tinggalnya karena suatu alasan dan bukan untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan upah.

Pariwisata adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dalam rangka keluar dari rutinitasnya dengan tujuan tertentu. Sedangkan jika diartikan sebagai kata benda, pariwisata dapat diartikan sebagai sebuah sektor industri baru yang dapat menumbuhkembangkan perekonomian suatu daerah sebagai dampak dari aktivitas pariwisata tersebut.

Obyek wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan kesuatu daerah tujuan wisata. Dalam kedudukannya yang sangat menentukan itu maka obyek wisata harus di rancang dan di bangun atau di kelola secara profesional sehingga dapat menarik wisatawan untuk datang. Membangun suatu obyek wisata harus di

rancang sedemikian rupa berdasarkan kriteria yang tepat dengan daerah wisata tersebut. Obyek wisata umumnya berdasarkan pada ;

- 1) Adanya sumber daya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah, nyaman, dan bersih.
- 2) Adanya aksesibilitas yang tinggi untuk dapat mengunjunginya.
- 3) Adanya ciri khusus/spesifikasi yang bersifat langka
- 4) Obyek wisata alam memiliki daya tarik tinggi karena keindahan alam pegunungan, sungai, pantai, pasir, hutan, dan sebagainya.
- 5) Obyek wisata budaya mempunyai daya tarik tinggi karena memiliki nilai khusus dalam bentuk atraksi kesenian, upacara-upacara adat, nilai luhur yang terkandung dalam suatu obyek buah karya manusia pada masa lampau.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan dijelaskan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi, dalam jangka waktu sementara (Ismayanti, 2011).

Selain itu, peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Kepariwisata dijelaskan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban melakukan tindakan pengawasan pengendalian atas kegiatan kepariwisataan,

dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negative bagi masyarakat luas.

Menurut Fandeli wisata adalah perjalanan atau sebagai kegiatan tersebut dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata.

Daya tarik wisata juga disebut obyek wisata yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan kesuatu daerah tujuan wisata. Dalam kedudukannya yang sangat menentukan itu maka obyek daya tarik wisata harus dirancang dan dikelola secara profesional sehingga dapat menarik wisatawan untuk datang. Daya tarik wisata itu harus dikelola sedemikian rupa agar keberlangsungannya dan kesinambungannya terjamin. Adapun daya tarik wisata sebagai berikut :

- 1) Daya tarik wisata ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang berwujud keadaan alam, serta flora dan fauna.
- 2) Daya tarik wisata hasil karya manusia yang berwujud museum, peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, dan tempat hiburan (Nyoman, 2003)

Dalam pengelolaannya, perlu dikembangkan pula "*Collaborative Management*" antara Instansi-Instansi yang berkepentingan (lintas sektor) dengan maksud untuk tetap menjaga kelestarian sejarah dan budaya yang ada. Adapun pola-pola kerjasama lintas sektor yang harus dikembangkan untuk pengelolaan obyek wisata ini adalah dengan semangat 4 (empat) M:

- a) *Mutual respect* (Saling menghormati)
- b) *Mutual trust* (Saling percaya)
- c) *Mutual responsibility* (Saling bertanggung jawab)
- d) *Mutual benefit* (Saling memperoleh manfaat)

2. Sarana Prasarana Obyek Wisata

a) Sarana obyek wisata

Sarana obyek wisata merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya. Pembangunan sarana wisata disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan baik kuantitatif maupun kualitatif. Sarana wisata kuantitatif menunjukkan pada jumlah sarana wisata yang harus disediakan, dan secara kuantitatif yang menunjukkan pada mutu pelayanan yang diberikan dan yang tercermin pada kepuasan wisatawan yang memperoleh pelayanan. Dalam hubungannya dengan jenis dan mutu pelayanan sarana wisata di daerah tujuan wisata telah disusun suatu standart wisata yang baku, baik secara nasional dan secara internasional, sehingga penyedia sarana wisata tinggal memilih atau menentukan jenis dan kualitas yang akan disediakan. Sarana pariwisata dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Sarana Pokok Obyek Wisata

Sarana Pokok obyek wisata adalah obyek wisata yang menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung

2. Sarana Pelengkap Pariwisata

Sarana Pelengkap obyek wisata adalah perusahaan atau tempat yang menyediakan fasilitas untuk rekreasi dan tujuan wisata

3. Sarana Penunjang Obyek Wisata

Sarana Penunjang obyek wisata adalah perusahaan yang menunjang sarana pelengkap dan sarana pokok yang berfungsi untuk membuat wisatawan betah di daerah tujuan wisata

b) Prasarana obyek wisata (tourism infrastructure)

Prasarana obyek wisata adalah semua fasilitas yang tersedia yang memungkinkan proses perekonomian berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Prasarana pariwisata tidak jauh berbeda dengan prasarana dalam perekonomian pada umumnya. termasuk prasarana pariwisata :

- 1) Prasarana perhubungan, meliputi: jalan raya, jembatan dan terminal bus, rel kereta api dan stasiun, pelabuhan udara (air-port) dan pelabuhan laut (sea port/harbour).
- 2) Instalasi pembangkit listrik dan instalasi air bersih

- 3) Sistem telekomunikasi seperti telepon, pos, telegraf, faksimili, telex, email, dan lain-lain
- 4) Prasarana kesehatan seperti rumah sakit dan pusat kesehatan masyarakat
- 5) Prasarana keamanan, pendidikan, kebersihan dan hiburan.

3. Fungsi dan Tujuan Obyek Wisata

Pada dasarnya setiap aktivitas atau kegiatan selalu mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Tujuan individu adalah untuk dapat memenuhi kebutuhan kebutuhan berupa materi dan nonmateri dari hasil kerjanya. Tujuan organisasi adalah mendapatkan laba (*business organization*) atau pelayanan/pengabdian (*public organization*) melalui proses manajemen itu (Hasibuan, 2009).

Pembagian fungsi- fungsi manajemen menurut beberapa ahli manajemen, seperti: Menurut George R. Terry fungsi manajemen seperti *Planning; Organizing; Acuanting; controlling*. Menurut Dr. S.P. Siagian fungsi manajemen seperti, *Planning; Organizing; motivating; controlling; evaluating*. Menurut Luther Gullick terdiri dari: *Planning; Organizing; Staffing; Directing; Coordinating; Reporting; Budgeting*. Menurut Henry Fayol tahapannya seperti *Planning; Organizing; Commanding; Coordinating Controlling*. Menurut Harold Koontz & Cyril O'Donnel seperti: *Planning; Organizing; Staffing; Directing; Controlling* (Hasibuan, 2009).

Dalam Penelitian ini, fungsi-fungsi manajemen yang digunakan adalah fungsi manajemen menurut George R. Terry mendiskripsikan manajemen berdasarkan fungsinya yakni perencanaan (*Planning*), pengorganisasian (*Organizing*), penggerakkan (*Actuating*), pengawasan (*Controlling*).

Fungsi-fungsi manajemen menurut George R. Terry adalah sebagai berikut (Leavitt, 1978):

a) Fungsi Perencanaan (*Planning*)

perencanaan merupakan langkah awal yang harus ditetapkan oleh sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai, tidak adanya perencanaan maka tujuan organisasi tidak akan dapat tercapai. Perencanaan adalah proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu seefisien dan seefektif mungkin.

b) Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian adalah tindakan mengusahakan hubungan-hubungan kelakuan yang efektif antara orang-orang, sehingga mereka dapat bekerjasama secara efisien, dan memperoleh kepuasan pribadi dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu, dalam kondisi lingkungan tertentu guna mencapai tujuan atau sasaran tertentu

c) Pelaksanaan (*actuating*)

Pelaksanaan merupakan usaha mengerakan anggota-anggota sekelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dari usaha untuk mencapai sasaran obyek wisata dan sasaran anggota-anggota pengelola obyek wisata tersebut oleh karena anggota itu juga ingin mencapai sasaran tersebut

d) Pengawasan (Controlling)

Controlling atau pengawasan merupakan fungsi manajerial dasar yang sengaja didesain untuk maksud tertentu sesuai dengan tujuan kontrol yang diharapkan, sehingga manajer dapat mengetahui efektivitas sumber-sumber informasi yang ada dalam organisasinya, efektivitas aktifitas kelompok, serta efektivitas aktifitas setiap individu anggota organisasinya.

Keberhasilan suatu kegiatan atau pekerjaan tergantung dari manajemen yang dilakukan. Pekerjaan ini akan berhasil apabila manajemennya baik atau teratur, dimana manajemen itu sendiri merupakan suatu perangkat dengan melakukan proses tertentu dalam fungsi yang terkait. Serangkaian tahapan kegiatan mulai awal melakukan kegiatan atau pekerjaan sampai akhir tercapainya tujuan kegiatan atau pekerjaan.

E. Tinjauan Tentang Konsep Strategi

Dalam melakukan fungsi-fungsi manajemen di suatu instansi atau perusahaan diperlukan strategi untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan.

Menurut Nawawi (2005:147) secara etimologis (asal kata) penggunaan kata strategi dalam manajemen sebuah organisasi diartikan sebagai kiat, cara, dan taktik utama yang dirancang secara sistematis dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, yang terarah pada tujuan organisasi.

Sedangkan menurut Lynch seperti yang dikutip dalam artikel, strategi perusahaan merupakan pola atau rencana yang mengintegrasikan tujuan utama atau kebijakan perusahaan dengan rangkaian tindakan dalam sebuah pernyataan yang saling mengikat. Strategi perusahaan biasanya berkaitan dengan prinsip-prinsip secara umum untuk mencapai misi yang dicanangkan perusahaan, serta bagaimana perusahaan memilih jalur yang spesifik untuk mencapai misi tersebut. Morrisey mengemukakan bahwa strategi adalah proses untuk menentukan arah yang harus dituju oleh perusahaan agar misinya tercapai dan sebagai daya dorong yang akan membantu perusahaan dalam menentukan produk, jasa, dan pasarnya di masa depan. Dalam menjalankan aktifitas operasional setiap hari di perusahaan, para pemimpin dan manajer puncak selalu merasa bingung dalam memilih dan menentukan strategi yang tepat karena keadaan yang terus menerus berubah.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa strategi adalah cara atau teknik yang digunakan oleh instansi atau perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu yang sesuai dengan visi dan misi instansi atau perusahaan tersebut.

Berbicara tentang strategi tidak dapat dipisahkan dari pengertian manajemen strategik. Menurut Siagian (2011) manajemen strategik adalah serangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi tersebut. Sedangkan (Nawawi, 2005) mendefinisikan manajemen strategik sebagai berikut:

“Manajemen strategik adalah proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara melaksanakannya, yang dibuat oleh manajemen puncak dan diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi, untuk mencapai tujuannya.”

Berdasarkan kedua definisi tersebut, maka manajemen strategik dapat didefinisikan sebagai proses pengambilan keputusan yang meliputi serangkaian tahapan manajemen, yang dilakukan oleh manajemen puncak dan diterapkan oleh seluruh pihak organisasi untuk mencapai tujuan.

Menurut Fred David (2009) manajemen strategik dapat didefinisikan sebagai seni dan pengetahuan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan-keputusan lintas fungsional yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuannya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam proses manajemen strategi terdiri atas tiga tahap, yaitu a) perumusan strategi, b) penerapan strategi, dan c) penilaian strategi. Penjelasan mengenai tahap dalam proses manajemen strategik adalah sebagai berikut:

Perumusan strategi mencakup pengembangan visi dan misi, identifikasi peluang dan ancaman eksternal suatu organisasi,

kesadaran akan kekuatan dan kelemahan internal, penetapan tujuan jangka panjang, pencarian strategi-strategi alternatif, dan pemilihan strategi tertentu untuk mencapai tujuan. Penerapan strategi mengharuskan perusahaan untuk menetapkan tujuan tahunan, membuat kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya, sehingga strategi-strategi yang telah dirumuskan dapat dijalankan. Penilaian strategi adalah tahap akhir dalam manajemen strategik yang mencakup: (a) peninjauan ulang faktor-faktor eksternal dan internal yang menjadi landasan bagi strategi saat ini, (b) pengukuran kinerja, (c) pengambilan langkah korektif.

Tahap dalam proses manajemen strategik meliputi pengembangan visi dan misi, analisis SWOT, pencarian strategi alternatif, dan pemilihan strategi. Berikut ini merupakan konsep analisis SWOT dalam proses manajemen strategik menurut Siagian (2011):

Analisis SWOT merupakan salah satu instrumen analisis dalam menetapkan strategi. Faktor kekuatan dan kelemahan terdapat pada tubuh suatu organisasi sedangkan faktor peluang dan ancaman merupakan faktor-faktor lingkungan yang dihadapi oleh organisasi yang bersangkutan. Faktor-faktor berupa kekuatan yang dimiliki oleh suatu organisasi adalah antara lain kompetensi yang khusus yang terdapat di dalam organisasi yang berakibat pada pemilikan keunggulan komparatif oleh unit usaha di pasaran. Faktor-faktor kelemahan adalah kelemahan-kelemahan yang ada di dalam tubuh organisasi, yaitu keterbatasan atau kekurangan dalam hal sumber, keterampilan dan kemampuan yang menjadi penghalang serius bagi penampilan kinerja organisasi yang memuaskan. Definisi sederhana tentang peluang ialah berbagai situasi lingkungan yang menguntungkan bagi suatu organisasi. Sedangkan faktor ancaman adalah kebalikan dari faktor peluang, yaitu berbagai situasi lingkungan yang tidak menguntungkan bagi organisasi.

Analisis SWOT adalah indentifikasi secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan, termasuk strategi pemasaran. Analisis ini didasarkan logika yang dapat memaksimalkan *strengths* (kekuatan),

opportunities (peluang), *weaknesses* (kelemahan), dan *threats* (ancaman). Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian *strategic planner* (Perencana Strategis) harus menganalisis faktor-faktor strategis perusahaan (Kekuatan, Peluang, Kelemahan, dan Ancaman) dalam kondisi aktual saat ini. Hal ini disebut dengan analisis situasi. Berikut merupakan diagram analisis SWOT:



Sumber : (Siagian, 2011)

Gambar 2. Diagram Analisis SWOT

Keterangan :

Kuadran 1: merupakan situasi yang sangat menguntungkan. Organisasi tersebut memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang diterapkan dalam kondisi ini adalah strategi yang mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*growth oriented strategy*).

Kuadran 2: meskipun menghadapi berbagai ancaman, organisasi masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan

peluang jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi (Produk/Pasar).

Kuadran 3: organisasi menghadapi peluang yang sangat besar, tetapi di pihak lain menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal. Fokus strategi organisasi ini adalah meminimalkan masalah-masalah internal perusahaan sehingga dapat merebut peluang yang lebih baik.

Kuadran 4: Menunjukkan situasi yang sangat tidak menguntungkan, organisasi menghadapi berbagai ancaman dan kelemahan internal. Harus segera mencari strategi bertahan (defensif).

Selanjutnya dalam sumber lain disebutkan contoh matriks analisis SWOT. Matriks SWOT adalah Alat yang digunakan dalam menyusun faktor-faktor strategis organisasi. Matriks ini menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman internal yang dihadapi dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan internal yang dimiliki. Matriks ini dapat menghasilkan empat set kemungkinan alternatif strategis, seperti pada Gambar berikut :

EFI	STRENGTH (S) (Tentukan faktor kekuatan internal)	WEAKNESSES (W) (Tentukan faktor kelemahan internal)
EFE	Strategi SO Daftar kekuatan untuk meraih keuntungan dari peluang yang ada	Strategi WO Daftar untuk memperkecil kelemahan dengan memanfaatkan keuntungan dari peluangnya
OPPORTUNITIES (O) (Tentukan faktor peluang eksternal)	Strategi ST	Strategi WT
THREATS (T)		

(Tentukan faktor ancaman eksternal)	Daftar kekuatan untuk menghindari ancaman	Daftar untuk memperkecil kelemahan dan menghindari ancaman
-------------------------------------	---	--

Gambar 3. Matriks SWOT

Berdasarkan Matriks SWOT tersebut, maka didapatkan 4 langkah strategi sebagai berikut :

a. Strategi SO

Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran organisasi, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Strategi SO menggunakan kekuatan internal perusahaan untuk memanfaatkan peluang eksternal

b. Strategi ST

Strategi ini menggunakan kekuatan yang dimiliki organisasi untuk mengatasi ancaman. Strategi ST menggunakan kekuatan internal perusahaan untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman eksternal

c. Strategi WO

Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Strategi WO untuk memperbaiki kelemahan internak dengan memanfaatkan peluang eksternal

d. Strategi WT

Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha meminimalkan kelemahan serta menghindari ancaman. Strategi WT bertujuan untuk mengurangi kelemahan internal dengan menghindari ancaman eksternal.

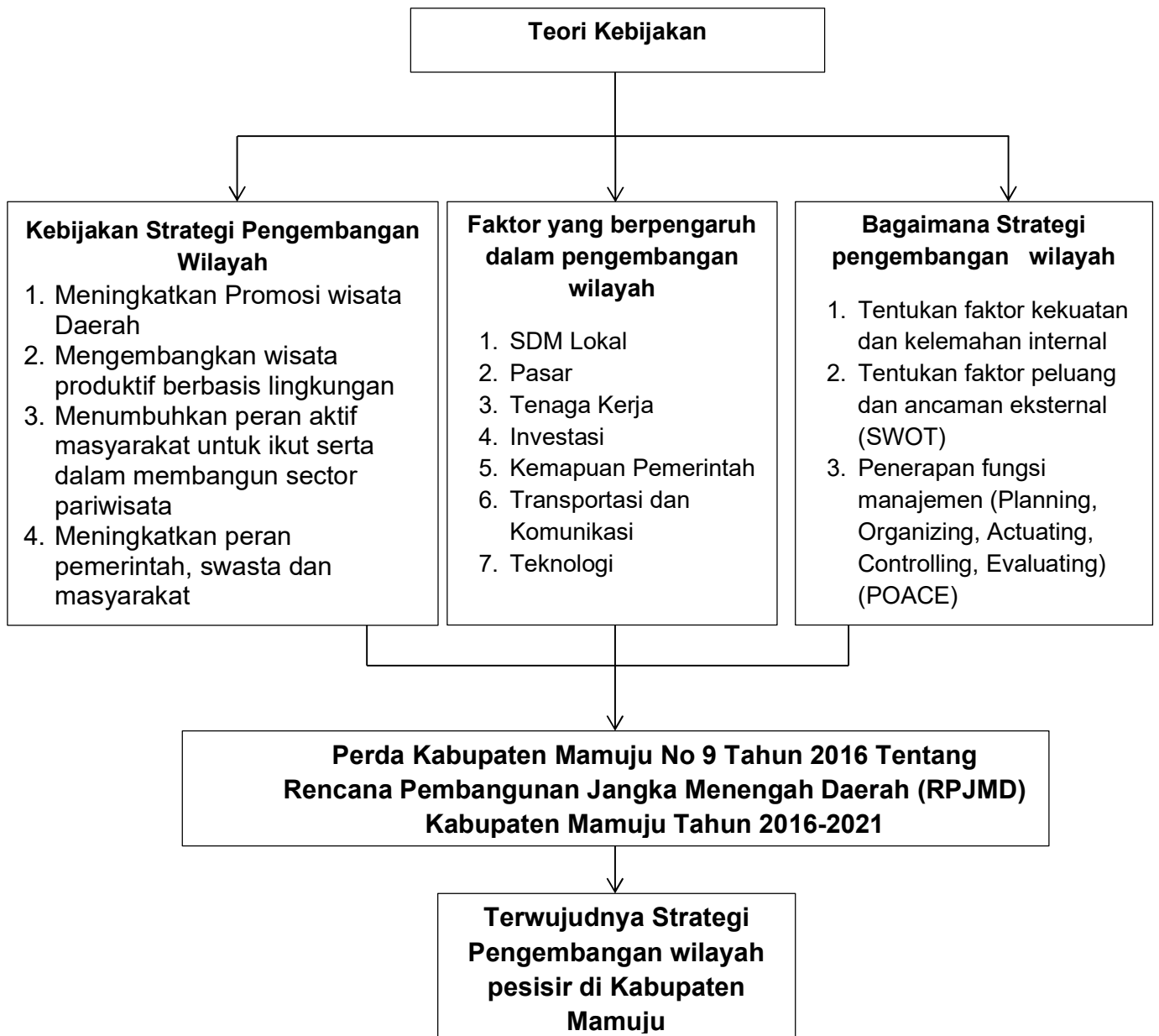
Berdasarkan berbagai keterangan di atas, maka analisis SWOT merupakan analisis yang digunakan untuk memetakan potensi kebaikan dan potensi keburukan dari suatu organisasi yang berasal dari dalam tubuh organisasi maupun yang berasal dari lingkungan organisasi. Potensi yang berasal dari dalam organisasi merupakan kekuatan dan kelemahan, sedangkan yang berasal dari luar organisasi disebut dengan peluang dan ancaman. Masing-masing kekuatan dan kelemahan internal, serta peluang dan ancaman eksternal harus dianalisis dengan bantuan diagram analisis SWOT atau matriks SWOT untuk menentukan strategi yang tepat bagi situasi sebuah organisasi.

F. Sintesa Penelitian
Tabel 2 Sintesa Penelitian

No	Peneliti	Judul	Tahun	Desain	Hasil
1.	Yati Heryati	Potensi Pengembangan Obyek Wisata Pantai Tapandullu di Kabupaten Mamuju	2019	Kualitatif	Obyek Wisata Pantai Tapandullu di Kabupaten Mamuju merupakan obyek wisata yang paling banyak dikunjungi masyarakat Mamuju selama ini, dimana lokasi yang strategis tidak terlalu jauh dari pusat keramaian, sehingga hari libur baanyak dimanfaatkan oleh masyarakat Mamuju maupun pengunjung yang berada diluar kota. Adanya Fasilitas tambahan seperti petugas keamanan, sarana prasarana, Pengembangan obyek wisata yang dilakukan pemerintah Kabupaten Mamuju masih dalam proses pembangunan infrastruktur dan masih melakukan kegiatan-kegiatan promosi, Kurangnya dukungan dari Pemerintah untuk mengelola daya tarik Obyek Wisata.
2.	Roy A Wattimena	Strategi Pengembangan Pesisir Pantai Desa Liang Sebagai Kawasan Objek Pariwisata	2017	Deskriptif Kualitatif	Membuat rencana induk atau dokumen perencanaan seperti Master Plan, DED (<i>Detail Engineering Design</i>), dan pembuatan skala prioritas pengembangan, Faktor pendukung dan penghambat berupa memiliki potensi daya tarik wisata adanya dukungan masyarakat , pemerintah yang peduli dalam pengembangan pariwisata

No	Peneliti	Judul	Tahun	Desain	Hasil
3.	Adi Wibowo	Strategi Kebijakan Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Manggar Kota Balikpapan	2015	Kualitatif	Mengembangkan wisata minat, khususnya wisata <i>jetsky, parasailing dan layar</i> , Membangun jaringan dengan obyek-obyek lain disekitar kawasan seperti pantai ambalat dan penangkaran buaya, Bekerjasama dengan agen-agen perjalanan baik yang ada di Indonesia maupun luar negeri, Meningkatkan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah, Membuat website khusus wisata Kawasan pantai manggar.
4.	Aldi Adrianus dkk	Strategi Pengembangan Pariwisata Pesisir di Desa Bentung Kabupaten Kepulauan Sangihe Provinsi Sulawesi Utara	2018	Analisis Deskriptif	Hasil penelitian mmenunjukkan bahwa potensi sumber daya pesisir di Desa Bentung seperti terumbu karang, hutan mangrove yang memiliki luas 2,82 Ha, keadaan hutan Mangrove tergolong dalam kondisi tidak rusak. Potensi pariwisata pantai Desa Bentung memiliki tiga kawasan pantai yang memiliki pasir yang berbeda yaitu Pantai Bulu, Pantai Nagha, Pantai Mairokang Bentung. MBG melaksanakan kegiatan – kegiatan yang bernuansa budaya Sangihe dan menjadi daya tarik wisata Kabupaten Kepulauan Sangihe, lomba ini merupakan lomba balap perahu. Hasil penelitian menyarankan perlunya fokus pembangunan sarana dan prasarana pariwisata.

G. Kerangka Pikir



Berdasarkan kerangka pikir diatas bahwa dalam mewujudkan strategi pengembangan wilayah pesisir pantai Tapandullu dimulai dengan menentukan prioritas pengembangan pantai. Hal yang pertama dilakukan melihat konsep kebijakan pengembangan wilayah, faktor yang mempengaruhi pengembangan wilayah dan bagaimana menganalisis strategi pengembangan wilayah. Analisis ini didasarkan logika yang dapat memaksimalkan strengths (kekuatan), opportunities (peluang), weaknesses (kelemahan), dan threats (ancaman). Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan daerah kabupaten Mamuju dari keiga hal tersebut disesuaikan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Pengembangan daerah pesisir sebagai objek pariwisata pantai merupakan salah satu isu strategis Kabupaten Mamuju terutama karena belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam. Masalah ini tertuang dalam Perda Kabupaten Mamuju No 9 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tahun 2016-2021. Konsep ideal tersebut ternyata masih belum optimal akibat permasalahan yang timbul. Sementara itu pantai-pantai yang lain memiliki daya tarik tersendiri, namun belum dikelola dengan baik. Pengembangan daerah pesisir pantai diharapkan dapat memberikan Pendapatan Asli Daerah yang optimal, meningkatkan taraf hidup masyarakat dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, diharapkan dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis berbagai permasalahan melalui kerangka pikir diatas diharapkan dapat menyusun strategi pengembangan wilayah pantai yang optimal.